

Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan  
Vol. 2 No. 3, Desember 2015: 254-262  
ISSN : 2355-6226  
E-ISSN : 2477-0299

## WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN PENYU DI PANTAI TEMAJUK KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

**Nurita<sup>1\*</sup>, Sri Mulatsih<sup>2</sup>, Meti Ekayani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mayor Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor

<sup>2</sup>Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor

<sup>3</sup>Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor

\*Email: [nuritalase@gmail.com](mailto:nuritalase@gmail.com)

### RINGKASAN

Pelestarian Penyu di Pantai Temajuk yang semakin terancam dari waktu ke waktu karena masalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Daerah perbatasan umumnya jauh dari pembangunan menyebabkan masyarakat lokal cenderung memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Salah satunya adalah penjualan telur Penyu secara ilegal yang mengakibatkan keberadaan Penyu di Pantai Temajuk terancam. Dalam lingkup nasional dan internasional Penyu berstatus dilindungi, namun kondisi Penyu semakin terancam karena aktivitas tersebut. Status perlindungan saja tidak cukup untuk mempertahankan kelestarian Penyu, selama secara ekonomi masyarakat lokal masih lemah. Penyu mempunyai potensi yang lebih besar dan bernilai jual. Pemanfaatan Penyu sebagai objek wisata merupakan salah satu alternatif solusi terhadap kepentingan perlindungan Penyu dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengunjung Pantai Temajuk mendukung usaha pelestarian Penyu melalui kesediaan membayar untuk tarif tiket wisata alam Penyu yang mempengaruhi penerimaan wisata dan berpotensi untuk memotivasi masyarakat lokal bekerja di bidang wisata. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat lokal menyatakan bersedia mengubah pola mencari nafkah dari menjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata.

Kata Kunci: *endangered species*, Pantai Temajuk, Penyu hijau, *willingness to pay*, wisata alam Penyu

### PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Semua jenis Penyu di Indonesia, seperti: Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu pipih (*Natator depressus*) dan Penyu tempayan (*Caretta caretta*), termasuk hewan yang

dilindungi menurut PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dalam IUCN Penyu hijau termasuk red list dengan status endangered atau terancam serta dalam CITES masuk Apendiks I, artinya segala bentuk perdagangan Penyu dilarang.

- ◆ Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya

pendapatan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat mengakibatkan penjualan telur Penyu menjadi alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem Penyu di Pantai Temajuk.

- ◆ Melibatkan masyarakat lokal secara langsung dalam kegiatan wisata merupakan salah satu usaha untuk melestarikan Penyu. Melalui pemanfaatan keberadaan Penyu sebagai salah satu objek wisata mendorong masyarakat lokal untuk melindungi Penyu karena keberadaannya akan berdampak pada pendapatan masyarakat lokal.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Rekomendasi kebijakan jangka panjang Pemerintah Daerah perlu membuat penangkaran Penyu seperti di Pangumbahan Kabupaten Sukabumi dan Pulau Serang Kota Denpasar, yang dapat dikombinasikan dengan Pantai Temajuk.
- ◆ Rekomendasi kebijakan jangka pendek
  1. Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk beralih dari kegiatan ilegal menjual telur Penyu ke kegiatan legal usaha di bidang wisata melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan terkait kegiatan wisata.
  2. Pemerintah Daerah perlu membangun akses jalan dan sarana prasarana serta promosi untuk membangun kawasan Desa Temajuk.

## I. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung

dengan Sarawak (Malaysia). Garis perbatasan tersebut sepanjang kurang lebih 966 km yang terbentang di 14 kecamatan dan 98 desa mulai dari Kabupaten Sambas sampai Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Barat triwulan III tahun 2011 bahwa terdapat 50 jalan setapak di wilayah perbatasan yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 desa di Sarawak (BI 2011). Kondisi tersebut menandai dekatnya hubungan masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kedekatan hubungan tersebut belum diikuti dengan kesetaraan kesejahteraan antara masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan di Kalimantan Barat yang masih jauh dari pembangunan. Dalam RPJM Kabupaten Sambas periode tahun 2012–2016 dirumuskan isu strategis tentang minimnya infrastruktur dasar daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Huruswati *et al.* (2012) bahwa permasalahan utama di perbatasan Kabupaten Sambas terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi yang masih sulit sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi, masyarakat perbatasan yang hidup kekurangan dari segi ekonomi cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang ada, salah satunya dengan menjual telur Penyu.

Perdagangan telur Penyu merupakan salah satu kegiatan pelanggaran terhadap PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Semua jenis satwa di dalam peraturan tersebut termasuk semua jenis Penyu (*Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*, *Lepidochelys olivacea*, *Dermochelys coriacea*, *Natator depressus* dan *Caretta caretta*) telah dilindungi.

Pelanggaran tersebut tetap dilakukan meskipun secara internasional, Penyu hijau (*Chelonia mydas*) masuk daftar merah (red list) di IUCN dengan status terancam (*endangered*) (IUCN 2013). Dalam CITES (2012) Penyu hijau tercatat dalam Apendiks I, artinya perdagangan telur Penyu secara ilegal masih terjadi di Kecamatan Paloh khususnya Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan Desa Teluk Melano (Malaysia Timur), karena Pantai Temajuk termasuk kawasan open access dan belum berstatus kawasan konservasi (DKP-Kabupaten Sambas 2014).

Berbagai peraturan telah dibuat secara internasional maupun nasional guna menjaga kelestarian Penyu. Pembuatan peraturan tersebut saja tidak cukup untuk mencegah masyarakat mengambil dan menjual telur Penyu, selama income masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, perlu suatu kebijakan yang dapat mendukung perlindungan Penyu dan secara bersamaan memberikan income yang minimal sama dengan income yang diterima jika mereka menjual telur Penyu. Salah satu alternatif solusinya adalah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi keberadaan Penyu sebagai salah satu objek wisata serta melibatkan masyarakat lokal dalam bentuk usaha di bidang wisata. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengkaji potensi usaha di bidang wisata melalui kesediaan membayar (WTP) pengunjung terhadap tarif tiket wisata alam Penyu, mengkaji kesediaan masyarakat lokal Desa Temajuk untuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata dan mengestimasi pendapatan masyarakat lokal Desa Temajuk menjual telur Penyu dan usaha di bidang wisata.

## II. KONDISI TERKINI

Enam jenis Penyu di Indonesia diberikan status dilindungi oleh negara, sebagaimana yang tertuang dalam PP nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Secara internasional, Penyu hijau termasuk daftar merah (red list) di IUCN dengan status terancam (*endangered*) yang diprediksi punah di masa akan datang. Selain itu, di dalam CITES tercatat bahwa Penyu hijau masuk Apendiks I, artinya keberadaannya di alam telah terancam sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius.

WWF-Indonesia (2012) periode tahun 2009–2011 menyatakan bahwa sebanyak 50.92 persen sarang Penyu di Pantai Paloh dalam kondisi terancam, 48 persen tidak dapat diselamatkan dan hanya 1.08 persen yang mampu diselamatkan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya persentase sarang Penyu yang telah diganggu oleh adanya aktivitas manusia. Seperti dijelaskan oleh WWF-Indonesia (2012) dan Anshary *et al.* (2014) bahwa keberadaan Penyu di Pantai Paloh terancam karena adanya aktivitas perdagangan telur Penyu yang menjadi ancaman utama bagi keberlangsungan hidupnya. Perdagangan telur Penyu oleh masyarakat juga terjadi di Pantai Temajuk yang merupakan bagian dari Pantai Paloh. Habitat Penyu di Pantai Temajuk terancam oleh aktivitas masyarakat mengambil dan menjual telur Penyu secara ilegal (WWF-Indonesia 2012).

Salah satu penyebab pengambilan telur Penyu oleh masyarakat karena Pantai Temajuk merupakan open access. DKP-Kabupaten Sambas

(2014) juga menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat lokal yang masih rendah dan jauh dari pembangunan juga menjadi faktor penunjang terjadinya aktivitas tersebut. Kondisi tersebut memicu masyarakat lokal memanfaatkan telur Penyu sebagai salah satu sumber penghasilan, meskipun secara hukum dilarang. Maryati (2013) menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat hampir 95 persen sarang telur Penyu (dari 2 146 sarang) di Pantai Temajuk diambil masyarakat dan dijual ke pengumpul dengan harga Rp 2 800 per butir, lalu pengumpul menjual ke Malaysia dengan harga RM 10 per butir.

### III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Penelitian ini secara sengaja (purposive) dilakukan di daerah perbatasan yaitu Desa Temajuk Kecamatan Paloh yang terletak di wilayah paling utara Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Daerah tersebut dipilih karena pendapatan utama masyarakat belum memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka menjual telur Penyu.

Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2015. Data sekunder diperoleh melalui informasi dari berbagai studi literatur dan informasi pendukung lainnya. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dengan bantuan kuesioner. Responden pengunjung ditetapkan 30 orang karena penelitian dilakukan saat low season atau musim sedikit pengunjung, yaitu pengunjung hanya datang pada akhir pekan selama bulan Maret, pengunjung yang datang sebagian besar berupa rombongan yang memiliki faktor demografi yaitu 10 sampai 20 orang, sehingga sampel yang diambil di setiap rombongan 1

sampai 2 orang. Pengunjung datang ke Desa Temajuk hanya pada hari-hari tertentu seperti: hari lebaran, kemerdekaan RI, Festival Pesisir Paloh dan liburan akhir pekan. Pengunjung paling banyak berkunjung pada saat hari lebaran dan bahkan 2 minggu setelah lebaran pengunjung tetap berwisata. Adapun responden masyarakat dipilih secara purposive, yaitu masyarakat yang mengambil dan menjual telur Penyu. Responden key persons terdiri atas: Kepala Desa Temajuk, Kabid Pariwisata dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas, Kabid Penataan Ruang Pesisir dan Laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas, pengelola Objek Wisata Teluk Atong Bahari dan anggota WWF-Kecamatan Paloh.

Desa Temajuk memiliki Pantai Temajuk yang merupakan bagian dari Pantai Paloh. Letak Desa Temajuk yang di perbatasan jauh dari pembangunan dan mengalami ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga, yaitu Malaysia. Kondisi ini mempengaruhi masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah menjual telur Penyu. Desa Teluk Melano Malaysia merupakan tempat potensial bagi masyarakat Desa Temajuk untuk memasarkan telur Penyu. Selain sebagai habitat Penyu, Pantai Temajuk juga banyak dikunjungi orang untuk melakukan wisata. Bahkan, beberapa masyarakat Desa Temajuk sudah bekerja di bidang wisata, seperti: penjual makanan dan minuman serta penyedia wisma penginapan. Pengembangan wisata Penyu di Pangumbahan dan Bali sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan menjaga kelestarian Penyu. Apabila income masyarakat bergantung dari wisata alam Penyu, maka masyarakat akan ikut menjaga kelestarian Penyu. Agar masyarakat bersedia beralih pola mencari nafkah dari menjual telur

Penyu ke usaha di bidang wisata, maka income yang diperoleh dari belanja pengunjung minimal sama dengan income menjual telur Penyu sehingga perlu diketahui potensi wisatawan yang bersedia berkunjung dan membayar apabila wisata alam Penyu dikembangkan. Penarikan tiket masuk wisata alam Penyu untuk mengontrol jumlah pengunjung agar tidak over carrying capacity, sehingga tidak membahayakan kelestarian Penyu. Hasil penjualan tiket dapat digunakan konservasi Penyu. Dengan demikian perlu dikaji WTP pengunjung terhadap wisata alam Penyu.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai WTP pengunjung Pantai Temajuk adalah metode bidding game. Metode tersebut dilakukan dengan menawarkan harga tiket secara bertahap hingga mendapatkan nilai WTP maksimal. Penawaran tarif tiket wisata dimulai dari nilai starting point Rp15 000 per tiket per orang dan interval Rp7 000. Penentuan nilai starting point dan interval berdasarkan informasi dari key persons, yaitu: Pengelola Objek Wisata Teluk Atung Bahari dan Kepala Desa Temajuk yang memiliki pengalaman dan pengetahuan wisata sejenis di Bali, dimana key persons tersebut telah menyesuaikan dengan kondisi di Pantai Temajuk. Apabila responden bersedia untuk membayar, maka penawaran dinaikkan secara bertahap sesuai interval hingga nilai maksimal yang responden

bersedia bayarkan. Sebaliknya, apabila responden tidak bersedia membayar saat ditawarkan nilai sebesar starting point, maka nilai yang ditawarkan diturunkan sesuai interval.

Sebagian besar pengunjung menyatakan bersedia untuk membayar tarif tiket wisata alam Penyu di Pantai Temajuk (90 persen) dan sisanya (10 persen) menyatakan tidak bersedia membayar. Alasan pengunjung yang tidak bersedia membayar cukup bervariasi, antara lain: tidak ada ketertarikan terhadap aktivitas Penyu, merasa cukup puas terhadap wisata yang sekarang atau kurang menyenangi wisata malam karena biasanya saat malam hari adalah waktu yang ideal untuk melihat aktivitas Penyu bertelur. Berikut adalah data rata-rata WTP pengunjung Pantai Temajuk terhadap tiket wisata alam Penyu.

Penetapan tarif tiket wisata alam Penyu dapat diterapkan berdasarkan nilai rata-rata WTP pengunjung yaitu sebesar Rp17 466.7 per tiket per orang (Tabel 1), namun tidak semua pengunjung bersedia membayar tiket sebesar nilai tersebut. Dari 30 responden pengunjung, ada 3 orang (10 persen) pengunjung yang tidak bersedia membayar tarif tiket wisata alam Penyu dan 17 orang (56.7 persen) pengunjung bersedia membayar tiket wisata tersebut di bawah Rp 17 466.7 per tiket per orang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penetapan tarif tiket wisata alam Penyu sesuai

Tabel 1. Rataan WTP pengunjung terhadap tiket wisata alam Penyu

Nilai WTP (Rp/tiket/orang)	Pengunjung		Rataan WTP (Rp)
	Frekuensi (orang)	Persentase	
0	3	10.0	0
8 000	1	3.3	266.7
15 000	16	53.4	8 000.0
22 000	3	10.0	2 200.0
29 000	6	20.0	5 800.0
36 000	1	3.3	1 200.0
Total	30	100.0	17 466.7

n = Jumlah responden pengunjung yaitu 30 orang



Tabel 2. Estimasi penerimaan dengan penerapan harga tiket sesuai WTP pengunjung

Harga tiket (Rp/tiket/orang) a	% pengunjung b	$\Sigma$ pengunjung (orang) $c = b \times N$	Estimasi penerimaan (Rp/th) $d = a \times c$
17 466.7	33.3	12 720	222 176 424
15 000.0	86.3	32 964	494 460 000
8 000.0	90.0	34 377	275 016 000

N = Jumlah pengunjung tahun 2013 yaitu 38 197 orang

rataan WTP pengunjung akan mengakibatkan turunnya jumlah pengunjung. Pengunjung yang tidak bersedia membayar yang memiliki WTP di bawah WTP rata-rata tidak akan berwisata di tempat tersebut. Oleh karena itu, perlu diestimasi jumlah penerimaan dari penerapan tiket berdasarkan WTP pengunjung (Tabel 2).

Tabel 2 menyajikan estimasi jumlah pengunjung dan penerimaan untuk penerapan 3 harga tiket. Disarankan lebih baik menerapkan harga tiket Rp15 000 karena jumlah penerimaannya paling besar di antara harga tiket lainnya. Penentuan harga tiket dapat mengontrol jumlah kunjungan agar tidak *over carrying capacity* dan tidak mengganggu kelestarian Penyu, hal ini sejalan dengan Ekayani dan Nuva (2015) dan Ekayani *et al.* (2014a). Saat diterapkan tarif tiket wisata sesuai rata-rata WTP yaitu Rp17 466.7 per kunjungan, penerimaan paling kecil karena jumlah pengunjungnya akan banyak berkurang (33.3 persen). Hal ini baik untuk *carrying capacity* namun tidak baik untuk jumlah penerimaan. Adapun saat tiket diterapkan sesuai WTP terendah pengunjung, maka jumlah kunjungan akan meningkat (dari 33.3 persen menjadi 90 persen) dan penerimaan juga akan meningkat (dari Rp222 176 424 prt tahun menjadi Rp275 016 000 per tahun). Hal ini akan riskan bagi *carrying capacity* karena akan ada peningkatan jumlah pengunjung yang sangat besar dan penerimaan tidak terlalu besar. Oleh karena itu, disarankan penerapan tiket

Rp15 000 dimana jumlah kunjungan lebih sedikit dari pada saat tiket Rp8 000 namun memberikan penerimaan lebih besar, yaitu Rp494 460 000. Kondisi ini dapat menguntungkan bagi kelestarian Penyu dimana pengurangan jumlah pengunjung menghasilkan penerimaan yang lebih besar yang dapat dialokasikan untuk biaya konservasi.

Kesediaan masyarakat lokal Desa Temajuk mengubah pola mencari nafkah dari menjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata berpengaruh terhadap tingkat keberadaan Penyu. Apabila masyarakat lokal bergantung pada usaha di bidang wisata khususnya wisata alam Penyu, maka secara tidak langsung keberadaan Penyu di Pantai Temajuk akan terjaga karena keberadaan Penyu menjadi daya tarik pengunjung untuk datang yang akan berdampak pada jumlah penerimaan usaha wisata. Jika masyarakat bergantung dari penerimaan wisata alam, maka masyarakat akan menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi objek utama wisata alam tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa kelestarian alam maka wisata alam tidak akan ada, yang berimplikasi pada hilangnya manfaat ekonomi bagi masyarakat dari kegiatan wisata alam (Ekayani *et al.* 2014b; Ekayani *et al.* 2014c).

Tabel 3 menunjukkan bahwa masyarakat lokal Desa Temajuk cenderung bersedia mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata. Hal ini didukung oleh Parma (2011), yaitu tingginya keterlibatan

Tabel 3. Kesiediaan masyarakat lokal Desa Temajuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata

Parameter	Frekuensi (orang)	Persentase
Kurang bersedia	1	5
Cukup bersedia	6	30
Bersedia	5	25
Sangat bersedia	8	40
Jumlah	20	100

Tabel 4. Persepsi masyarakat lokal terhadap jenis pekerjaan yang dipilih

Jenis pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase
Pemandu wisata Penyu	6	30
Penjual makanan/minuman	8	40
Penjual souvenir	0	0
Penyewaan sarana dan prasarana wisata	4	20
Pelayanan jasa ojek	1	5
Tidak memilih	1	5
Jumlah	20	100

masyarakat dalam pengelolaan wisata menyebabkan terjadi pergeseran pola mencari nafkah yang awalnya mengutamakan hasil laut dan kemudian bergeser ke pola industri kecil menengah di bidang wisata.

Tabel 4 menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat lokal Desa Temajuk memilih pekerjaan sebagai penjual makanan dan minuman yakni sebanyak 40 persen. Hal ini disebabkan jenis pekerjaan ini sudah dilakukan oleh beberapa warga Desa Temajuk. Zuhriana *et al.* (2013) menyatakan hal yang sama, yaitu masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai lebih banyak bekerja di bidang wisata sebagai penjual makanan dan minuman, bahkan usaha tersebut dijadikan sebagai pekerjaan utama.

Berdasarkan Tabel 3 dan 4, diketahui bahwa masyarakat lokal Desa Temajuk memiliki potensi untuk bekerja di bidang wisata. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lokal justru akan melindungi Penyu sebagai salah satu objek wisata

yang merupakan salah satu usaha pelestarian Penyu. Agar dapat meningkatkan motivasi masyarakat lokal Desa Temajuk untuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata, maka dianalisis perbandingan pendapatan dari kedua usaha tersebut.

Hasil masyarakat Desa Temajuk dari pengambilan telur Penyu rata-rata berjumlah 1 169 butir per tahun per orang. Biaya rata-rata yang dikeluarkan sebesar Rp212 475 per tahun per orang dan harga jual telur Penyu Rp2 500 per butir sehingga pendapatan rata-rata masyarakat lokal yang menjual telur Penyu adalah Rp2 710 025 per tahun per orang (Tabel 5).

Besaran pendapatan masyarakat lokal Desa Temajuk dari hasil menjual telur Penyu tidak dapat dipastikan setiap bulannya, karena aktivitas pengambilan telur Penyu hanya bisa dilakukan pada musim Penyu bertelur. Penyu bertelur biasanya terjadi mulai Juni hingga Agustus (DKP-Kabupaten Sambas 2014), artinya bulan-bulan

Tabel 5. Estimasi pendapatan masyarakat lokal Desa Temajuk

Jenis pekerjaan	Total penerimaan (Rp/th) (dalam ribuan)	Penerimaan rata-rata (Rp/th/orang) (dalam ribuan)	Biaya rata-rata (Rp/th/orang)	Pendapatan rata-rata (Rp/th/orang)
1. Penjual telur Penyu (A)	58 450	2 922.5	212 475	2 710 025
2. Usaha di bidang wisata (B)	467 160	58 395.0	39 064 625	15 380 375
Selisih (B – A)	408 710	55 472.0	38 852 150	12 670 350

tersebut merupakan bulan rawan untuk keselamatan telur Penyu sehingga perlu ada suatu alternatif *income* pada bulan terkait yang dapat diubah dari mencuri telur Penyu yang mengancam kelestarian Penyu menjadi wisata alam Penyu yang mendukung pelestarian Penyu.

Tabel 5 menunjukkan *income* dari kegiatan wisata bahkan lebih besar dari penjualan telur Penyu sehingga memotivasi masyarakat lokal mengubah pola mencari nafkah dari menjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata. Hal ini didukung Parma (2011), yaitu adanya potensi *income* dari wisata dapat menggantikan *income* dari mencuri dan menjual telur Penyu. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat lokal untuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu berpindah bekerja di bidang wisata seperti: penjual makanan dan minuman, pemandu wisata, pelayanan jasa ojek serta penyewaan sarana dan prasarana wisata (wisma penginapan, peralatan renang, perahu dan sebagainya).

Pemanfaatan keberadaan Penyu di Desa Temajuk sebagai objek wisata merupakan salah satu alternatif solusi sebagai usaha perlindungan Penyu dan secara bersamaan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal melalui usaha di bidang wisata. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yaitu kesediaan membayar pengunjung terhadap tarif tiket wisata alam Penyu yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung

Desa Temajuk mendukung kegiatan perlindungan Penyu dengan nilai WTP rata-rata terhadap harga tiket wisata alam penyu, yaitu Rp17 446.7. Untuk mengontrol jumlah pengunjung agar tidak *over carrying capacity* dan mendapatkan biaya konservasi dari penerimaan tiket disarankan penerapan tiket Rp15 000. Masyarakat lokal bersedia untuk mengubah pola mencari nafkah dari penjual telur Penyu ke usaha di bidang wisata. Jenis pekerjaan yang paling banyak dipilih masyarakat lokal Desa Temajuk adalah penjual makanan dan minuman. Pendapatan dari usaha di bidang wisata dapat menggantikan pendapatan dari menjual telur Penyu sehingga dapat memotivasi masyarakat lokal untuk bekerja di bidang wisata dan berbalik menjadi melindungi Penyu, karena tanpa kelestarian penyu maka tidak akan ada wisata alam penyu. Tanpa wisata alam penyu tidak ada belanja pengunjung, artinya tidak ada pendapatan bagi masyarakat tersebut, hal ini sejalan dengan Ekayani *et al.* (2014c).

## REFERENSI

- Anshary, M., Setyawati, T.R., Yanti, A.H. 2014. Karakteristik pendaratan Penyu hijau (*Chelonia mydas*, Linnaeus 1758) di pesisir Pantai Tanjung Kemuning Tanjung Api dan Pantai Belacan Kecamatan Paloh



- Kabupaten Sambas. *Protobiont*. 3(2):232-239.
- [BI] Bank Indonesia. 2011. Kajian ekonomi regional Provinsi Kalimantan Barat triwulan III: Perbatasan Kalimantan Barat masih perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [CITES] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 2012. Internationally endangered plants and animals [Internet]. [diunduh 2015 Jan 16]. Tersedia pada: <http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml>.
- [DKP-Kabupaten Sambas] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas. 2014. Profil Desa Temajuk Kabupaten Sambas. Sambas (ID): DKP Kabupaten Sambas.
- Ekayani, M., Nuva., Nurrochmat, D.R. 2014a. Promoting Co-Benefits of ecotourism as a complementary strategy sustainable Gunung Halimun Salak National Park management. *The International Forestry Review* (XXIV IUFRO World Congress). 16(5). 2014. Salt Lake City. Utah. USA.
- Ekayani, M., Nuva., Yasmin, R., Shaffitri, L.R, Tampubolon, B.I. 2014b. Taman nasional untuk siapa? tantangan membangun wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 1(1):46-52.
- Ekayani, M., Nuva., Yasmin, R., Sinaga, F., Maaruf, L.O. 2014c. Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: solusi kepentingan ekologi dan ekonomi. *JUPI*. 19(1):29-37.
- Ekayani, M., Nuva. 2015. Menggagas pembayaran jasa lingkungan dalam Wisata Alam (book chapter) in Firdaus M, Rifin A, Sahara, Ekayani M, Andrianto S(eds) 2015. Orange Book 6: Pembangunan Pertanian yang Berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Bogor. IPB Press. 350pp.
- Huruswati, I., Alit, K., Agus, B.P., Sabeni, M. 2012. *Evaluasi program pembangunan kesejahteraan sosial di desa perbatasan Kalimantan Barat*. Jakarta (ID): P3KS Pr.
- [IUCN] International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. 2013. IUCN SSC marine turtle specialist group. pada: <http://iucn.mtsg.org/about-turtles/species/green>.
- Maryati. 2013. Perburuan telur Penyu kembali marak di Sambas. Tersedia pada: <http://m.antaranews.com/berita/399278/perburuan-telur-Penyu-kembali-marak-di-sambas>.
- Parma, I.P.G. 2011. Faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam festival pesona Pulau Serang di Kota Denpasar. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*. 1(2):1-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [WWF-Indonesia] World Wide Fund for Nature-Indonesia. 2012. Status populasi Penyu di Kecamatan Paloh, Sambas. Jakarta (ID): Gita Media Gemilang.
- Zuhriana, D., Alikodra, H.S, Adiwibowo, S., Hartrisari, H. 2013. Peningkatan peluang kerja bagi masyarakat lokal melalui pengembangan ekowisata di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Media Konservasi*. 18(1):28-39.